

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Era globalisasi telah menyatukan negara-negara bagaikan tanpa dinding dan batas, arus teknologi terutama teknologi informasi semakin membuka ruang dan waktu, bahkan migrasi penduduk serta perdagangan bebas nampaknya akan menjadi kecenderungan dunia. Negara Indonesia beserta seluruh warganya akan menghadapi persaingan terbuka, di satu sisi akan menjadi peluang untuk maju namun di sisi lain setiap individu warga negara perlu cerdas untuk memenangkan persaingan dan kompetisi tersebut.

Abad ke-21 sebagai abad globalisasi menuntut dunia pendidikan mempunyai kemampuan bermitra dan berkompetisi pada skala internasional. Unjuk kerja dan visi pendidikan nasional harus mampu secara signifikan meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) bangsa menuju penemuan jati diri dalam rangka menembus persaingan skala global. Di sisi lain, Indonesia tengah memasuki era yang disebut Abad Asia, dituntut harus tampil secara kompetitif (Danim, 2003).

Oleh karena itu, visi pendidikan nasional yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 19 tahun 2005 adalah mewujudkan sistem pendidikan sebagai pranata sosial yang kuat dan berwibawa untuk memberdayakan semua warga negara Indonesia agar berkembang menjadi manusia yang berkualitas sehingga mampu dan proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah. Sementara misi pendidikan nasional yang tertuang dalam PP No. 19 tahun 2005 antara lain: (1) mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu bagi seluruh rakyat Indonesia; (2) meningkatkan mutu pendidikan yang memiliki daya saing di tingkat nasional, regional, dan internasional; (3) meningkatkan relevansi pendidikan dengan kebutuhan masyarakat dan tantangan global.

Sejalan dengan itu, Laporan Komisi Internasional UNESCO (United Nations Education Scientific and Cultural Organization) tentang pendidikan abad ke-21 menekankan antara lain pada: (1) pandangan pendidikan dari komunitas lokal ke masyarakat dunia; (2) menerapkan prinsip empat sendi atau empat pilar pendidikan

yaitu belajar mengetahui (learning to know), belajar berbuat (learning to do), belajar hidup bersama (learning to live together to live with others); belajar menjadi seseorang (learning to be); (3) belajar sepanjang hayat (life long learning); (4) arah pendidikan menuju kerja sama antar bangsa (Saifuddin,1998).

Perubahan dan pembaharuan dalam abad ke-21 berdampak pada pendidikan yang dirancang tidak hanya berwawasan nasional, tetapi juga bermisi global (bertaraf internasional). Pandangan ini akan berpengaruh secara mendasar pada misi dan fungsi sekolah, pengembangan kurikulum, pendidikan guru, dan proses belajar-mengajar (Suriamihardja, 1998:77-80).

Dalam pembukaan UUD 1945 dinyatakan bahwa salah satu tujuan negara Republik Indonesia adalah mencerdaskan kehidupan bangsa, untuk itu setiap warga negara Indonesia tanpa memandang status sosial, ras, etnis, agama, dan gender berhak memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan minat dan bakat yang dimilikinya. Kehadiran pendidikan yang bermutu merupakan pra-syarat adanya SDM yang berkualitas, yaitu warga negara yang unggul secara intelektual, anggun dalam moral, kompeten menguasai IPTEK, produktif dalam karya dan memiliki komitmen yang tinggi untuk berbagai peran sosial, serta berdaya saing terhadap bangsa lain di era global. Oleh karena itu, terwujudnya insan Indonesia yang cerdas dan kompetitif adalah mutlak, dan untuk kepentingan tersebut perlu ditetapkan strategi dan program pendidikan yang sistemik, yang dapat digunakan dan menjadi rujukan nasional, upaya tersebut antara lain dengan meningkatkan keprofesionalan lembaga pendidikan.

Terkait dengan itu dalam pasal 50 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional mengamanatkan: “pemerintah dan/atau pemerintah daerah menyelenggarakan sekurang-kurangnya satu satuan pendidikan pada semua jenjang untuk dikembangkan menjadi satuan pendidikan bertaraf internasional”. Hal ini juga ditegaskan dalam Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP) pasal 61 ayat (1) yang menyebutkan tentang SBI sebagai berikut: “Pemerintah bersama-sama pemerintah daerah menyelenggarakan sekurang-kurangnya satu satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan sekurang-kurangnya satu satuan pendidikan pada jenjang pendidikan menengah untuk dikembangkan menjadi satuan

pendidikan bertaraf internasional”. Pernyataan ini dimaksudkan agar selain mengembangkan keunggulan lokal melalui penyediaan tenaga-tenaga terdidik, pemerintah juga menyikapi perlunya tersedia satuan pendidikan yang dapat menghasilkan lulusan kaliber dunia di Indonesia (Anwar, 2003).

Selain itu, pada Rencana Strategis Departemen Pendidikan Nasional Tahun 2005-2009 dikatakan bahwa “untuk meningkatkan daya saing bangsa, perlu dikembangkan sekolah bertaraf internasional pada tingkat kabupaten/kota melalui kerjasama yang konsisten antara pemerintah dengan pemerintah kabupaten/kota yang bersangkutan, untuk mengembangkan SD, SMP, SMA, dan SMK yang bertaraf internasional”. Saat ini terdapat beberapa istilah yang digunakan sekolah, baik negeri maupun swasta, yakni Sekolah Bertaraf Internasional (SBI), Sekolah Nasional Plus, Sekolah Bilingual, Sekolah Nasional Bertaraf Internasional (SNBI), serta kelas rintisan bertaraf internasional sebagai embrio menuju SNBI.

Beberapa latar belakang diadakannya sekolah/kelas bertaraf internasional, yaitu agar siswa mampu bersaing dalam era globalisasi, membiasakan diri berbahasa Inggris dalam percakapan sehari-hari, dan memudahkan siswa melanjutkan pendidikan ke luar negeri. Dengan menguasai Bahasa Inggris, suatu bangsa akan memiliki akses lebih besar pada sumber-sumber informasi ilmu pengetahuan dan teknologi. Guna meningkatkan sumber daya manusia agar mampu bersaing di era globalisasi, maka pengajaran Bahasa Inggris dilakukan sejak di sekolah dasar (Muljoatmojo, 1998).

Dari sisi kurikulum, banyak sekolah-sekolah mengadaptasi atau mengadopsi kurikulum internasional, misalnya IB (International Baccalaureate) dan Cambridge Curriculum. Beberapa sekolah mengadaptasi atau mengadopsi kurikulum negara lain seperti Western atau Victoria Australia, beberapa sekolah menggunakan Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) atau Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan tetapi pembelajaran bilingual.

Selain itu, salah satu hal yang menjadi tolok ukur terpilihnya SBI adalah adanya piranti sekolah yang dirasa telah mampu untuk menyelenggarakan SBI misalnya memiliki multi media dengan multi akses dengan program IT (Media Indonesia, 16 Oktober 2004). Adanya tuntutan masyarakat pada sekolah yang

berkualitas internasional tidak dapat dibendung, sehingga banyak sekolah di kota-kota besar telah menyelenggarakan SBI. Apalagi didukung dengan adanya legitimasi hukum dalam undang-undang sistem pendidikan nasional.

Sementara itu, lulusan sekolah bertaraf internasional diharapkan mempunyai kompetensi yang mampu menjawab tantangan global dan cakap berkomunikasi dan memanfaatkan teknologi komunikasi. Penyelenggaraan SBI diharapkan juga agar siswa dapat melanjutkan sekolah ke luar negeri, membuka peluang untuk go international dengan mulus, sehingga dapat menunjukkan prestasi di tingkat dunia, serta bagi guru dapat menjadikan motivasi untuk belajar dan bereksperimen dengan kurikulum negara lain.

Departemen Pendidikan Nasional melalui Direktorat Pembinaan TK dan SD sebagai salah satu institusi pemerintah yang melaksanakan tugas dan fungsinya dalam bidang layanan pendidikan pada tahun 2007 telah melakukan langkah awal yaitu melakukan pengembangan sekolah dasar yang hampir atau telah memenuhi semua aspek Standar Nasional Pendidikan (SNP) yakni standar isi, standar kompetensi lulusan, standar proses, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pembiayaan, standar pengelolaan, dan standar penilaian, untuk dikembangkan menjadi rintisan sekolah bertaraf internasional (RSDBI). Sebagai sekolah RSDBI, diharapkan akan dapat berkembang menuju sekolah bertaraf internasional dan sekaligus berfungsi sebagai patok duga (bench mark) bagi sekolah lain dalam mengembangkan diri menuju layanan pendidikan yang ideal.

Dalam Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dinyatakan bahwa pemerintah daerah mempunyai kewenangan penuh untuk mengelola pendidikan, melalui sumber daya pendidikan yang terdapat di daerah, dengan cara memanfaatkan potensi yang ada di daerah tersebut. Dengan mendasarkan pada amanat Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 pasal 50 ayat (3) tentang Sistem Pendidikan Nasional yang mengamanatkan: “pemerintah dan/atau pemerintah daerah menyelenggarakan sekurang-kurangnya satu satuan pendidikan pada semua jenjang untuk dikembangkan menjadi satuan pendidikan bertaraf internasional tersebut, maka kebijakan pemerintah daerah diharapkan dapat terus memacu pihak sekolah untuk mengembangkan program pendidikan yang memiliki

kompetensi bertaraf internasional.

Target itulah yang diarahkan pada setiap sekolah untuk terus memacu dan mengembangkan manajemen pendidikan agar bisa menjadi sekolah bertaraf internasional. Peningkatan kualitas pendidikan itu akan lebih diarahkan pada pencapaian standar isi, standar pendidik dan tenaga kependidikan, pencapaian standar biaya, standar pengelolaan, standar penilaian, standar proses pembelajaran serta yang paling utama yakni pencapaian standar kompetensi lulusan.

Departemen Pendidikan Nasional khususnya Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah melalui Direktorat Pembinaan Taman Kanak-kanak dan Sekolah Dasar telah merintis beberapa sekolah yang diharapkan mampu menerapkan standar mutu menuju sekolah bertaraf internasional. Sekolah bertaraf internasional (SBI) adalah sekolah yang memenuhi standar nasional pendidikan (SNP) serta mempunyai keunggulan yang merujuk pada standar pendidikan salah satu negara anggota Organization for Economic Co-operation Development (OECD) dan/atau negara maju lainnya yang mempunyai keunggulan tertentu dalam bidang pendidikan sehingga memiliki daya saing di forum internasional. Secara singkat rumus  $SBI = SNP + X$ . Unsur X mencakup adoptif dan adaptif kurikulum berstandar internasional. Selama ini, Direktorat menunjuk sekolah-sekolah yang dianggap unggul di tingkat kabupaten/kota dicoba sebagai sekolah rintisan menuju sekolah bertaraf internasional. Harapannya, sekolah unggul ini mampu memenuhi kriteria standar nasional pendidikan (SNP) secara mantap sehingga tinggal mengembangkan unsur X-nya saja. RSBI agar benar-benar menjadi SBI diberi kesempatan menyiapkan dirinya selama lima tahun.

Program subsidi RSDBI adalah program pemberian bantuan dana yang disalurkan langsung oleh Direktorat Pembinaan TK dan SD ke sekolah penyelenggara RSDBI. Program subsidi RSDBI ini dimulai sejak tahun 2007 dengan sasaran meliputi 38 RSDBI, kemudian pada tahun 2008 sebanyak 66 RSDBI, dan pada tahun 2009 sebanyak 66 RSDBI. Sasaran RSDBI adalah 33 provinsi dengan ketentuan untuk sementara yakni 1 kabupaten/kota memiliki 1 RSDBI.

Penerimaan dana subsidi untuk RSDBI tahun 2007 yang terdiri dari 38 SD pada tahun 2007 (tahun pertama) sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), tahun 2008 (tahun kedua) sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), dan tahun 2009 (tahun ketiga) sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah). Kemudian pada tahun 2008 terdiri dari 66 RSDBI, yang pada tahun 2008 (tahun pertama) mendapatkan subsidi sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), dan pada tahun 2009 (tahun kedua) mendapatkan subsidi sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah). Pada tahun 2009 jumlah sasaran sebanyak 66 RSDBI baru dengan subsidi tahun pertama sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah). Pembiayaan/pendanaan pengembangan RSDBI berasal dari 2 (dua) sumber, yaitu sumber dari APBN dan *sharing* APBD yang besarnya minimal 10% dari dana APBN. Adapun penggunaan dana subsidi RSDBI diatur dengan petunjuk teknis program rintisan subsidi RSDBI.

Pemberian subsidi RSDBI ditujukan untuk menyediakan fasilitas yang memadai kepada peserta didik, baik fasilitas untuk menunjang kegiatan pembelajaran dalam meningkatkan intelektual maupun fasilitas lainnya yang menunjang pengembangan keterampilan sehingga dihasilkan lulusan yang bermutu dan siap mengikuti pendidikan selanjutnya.

Sampai pada tahun 2009 ini kebijakan subsidi RSDBI ini telah berjalan selama 3 (tiga) tahun dan penggunaan dana diatur dengan panduan teknis pelaksanaan subsidi RSDBI. Dengan adanya program subsidi RSDBI ini diharapkan adanya peningkatan kualitas dari sekolah reguler menjadi rintisan sekolah dasar bertaraf internasional dan selanjutnya dapat mengembangkan diri menjadi sekolah dasar bertaraf internasional yang bermutu dan berdaya saing internasional, dengan indikator tertibnya program MBS, program pembelajaran yang mengarah ke standar internasional, lingkungan sekolah yang kondusif, dan memiliki sarana prasarana yang memadai.

## 1.2. Perumusan Permasalahan

Pokok permasalahan yang paling mendasari dalam penelitian ini adalah bahwa obyek dalam penelitian ini yakni SDNP (Sekolah Dasar Negeri Percontohan) Menteng 01 Jakarta Pusat dan SD Negeri Sukadamai 3 Kota Bogor pada tahun ini telah memasuki tahun ketiga yang merupakan tahun akhir fase rintisan. Dengan berakhirnya fase rintisan ini diharapkan kedua sekolah tersebut dapat mengembangkan diri menuju fase konsolidasi (pendampingan) dan selanjutnya menuju fase kemandirian yakni benar-benar siap menjadi sekolah dasar bertaraf internasional. Berkaitan dengan subsidi yang telah diberikan kepada kedua sekolah ini, maka peneliti ingin melihat sejauhmana implementasi dan efektivitas subsidi tersebut dapat dipergunakan dan dimanfaatkan oleh kedua sekolah tersebut dalam menuju sekolah dasar bertaraf internasional.

Studi kasus akan mengambil 2 RSDBI yakni SDNP Menteng 01 Jakarta Pusat yang terdapat di wilayah Provinsi DKI Jakarta dan SD Negeri Sukadamai 3 Kota Bogor yang terdapat di wilayah Provinsi Jawa Barat. Penentuan SD didasarkan pada pertimbangan bahwa kedua SD tersebut merupakan sekolah dasar penerima bantuan subsidi RSDBI dan telah melaksanakan subsidi RSDBI sejak tahun 2007. Selain itu pemilihan lokasi, khususnya SDNP Menteng 01 Jakarta Pusat Provinsi DKI Jakarta didasari oleh pertimbangan bahwa Provinsi DKI Jakarta merupakan barometer nasional bagi mutu pendidikan di Indonesia dengan indikator adanya sumber daya pendidikan dan sarana prasarana pendidikan yang memadai. Sedangkan alasan pemilihan SD Negeri Sukadamai 3 Kota Bogor Provinsi Jawa Barat adalah untuk melihat bagaimana pelaksanaan pekerjaan subsidi yang dilakukan di daerah di luar DKI Jakarta.

Berdasarkan penjelasan pada latar belakang penelitian ini, selanjutnya dirumuskan pokok permasalahan sebagai berikut:

- 1) Bagaimana efektivitas subsidi RSDBI bagi sekolah dalam menuju fase kemandirian sebagai Sekolah Dasar Bertaraf Internasional?
- 2) Hambatan apa yang ditemukan dalam implementasi kebijakan subsidi RSDBI bagi sekolah dalam menuju fase kemandirian sebagai Sekolah Dasar Bertaraf Internasional?

### 1.3. Tujuan Penelitian

Untuk menjawab pokok permasalahan sebagaimana telah dirumuskan di atas, maka penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

1. untuk mengetahui efektivitas subsidi RSDBI bagi sekolah dalam menuju fase kemandirian sebagai Sekolah Dasar Bertaraf Internasional.
2. untuk mengetahui hambatan yang ditemukan dalam implementasi kebijakan subsidi RSDBI bagi sekolah dalam menuju fase kemandirian sebagai Sekolah Dasar Bertaraf Internasional.

### 1.4. Manfaat Penelitian

Sesuai dengan tujuan penelitian, maka hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat, antara lain:

- 1) Bagi penulis sendiri, penelitian ini memperluas cakrawala berpikir dan menambah pengetahuan penulis dalam mengkaji masalah-masalah subsidi bidang pendidikan yang diberikan kepada sekolah-sekolah.
- 2) Bagi perumus dan pengambil kebijakan, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dan pijakan dalam pengambilan kebijakan subsidi bidang pendidikan di masa mendatang.
- 3) Sebagai bahan kontribusi terhadap khasanah ilmu pengetahuan, sehingga dapat dijadikan bahan informasi dan referensi bagi peneliti selanjutnya yang berminat untuk melakukan penelitian terhadap masalah yang berkenaan dengan pengelolaan subsidi bidang pendidikan di sekolah.

### 1.5. Batasan Penelitian

Penelitian ini akan dibatasi dan dikhususkan pada implementasi kebijakan subsidi RSDBI yang sudah berjalan selama 3 (tiga) tahun. Hal ini dimaksudkan agar aspek-aspek yang diteliti dapat lebih menyeluruh. SDNP Menteng 01 Jakarta Pusat dan SD Negeri Sukadamai 3 Kota Bogor dipilih sebagai obyek penelitian ini karena memenuhi kriteria tersebut.



## 1.6. Sistematika Penulisan

Penulisan Tesis ini terdiri dari enam Bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

### **BAB 1 : PENDAHULUAN**

Dalam bab ini memuat latar belakang masalah, perumusan permasalahan, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan penelitian, dan sistematika penulisan

### **BAB 2 : TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini membahas tentang kebijakan publik dan kebijakan pendidikan yang meliputi landasan teori tentang konsep kebijakan publik, implementasi, dan model implementasi kebijakan ; globalisasi, pendidikan dalam perspektif globalisasi; *international education* (pendidikan internasional); *international school* (sekolah internasional), konsep *international school* (sekolah internasional); kurikulum *international school* (sekolah internasional), *Quality Assurance* (penjaminan mutu); subsidi; efektivitas; evaluasi kebijakan subsidi.

### **BAB 3 : METODE PENELITIAN**

Bagian ini memuat metode penelitian yang digunakan, meliputi pendekatan penelitian, tipe penelitian, lokasi dan ruang lingkup penelitian, jenis data, metode pengumpulan data, teknik pemilihan informan, teknik pengolahan dan analisis data.

### **BAB 4 : GAMBARAN UMUM**

Bagian ini mendeskripsikan tentang Gambaran Umum tentang SDNP Menteng 01 Jakarta Pusat, Gambaran Umum tentang SD Negeri Sukadama 3 Kota Bogor, Gambaran Umum tentang Kebijakan Subsidi RSDBI, dan Penjaminan Mutu Sekolah/Madrasah Bertaraf Internasional.

### **BAB 5 : ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SUBSIDI RSDBI**

Dalam Bab ini dianalisis tentang efektivitas subsidi RSDBI terhadap kesiapan sekolah dalam rangka menuju sekolah dasar bertaraf internasional dengan menggunakan teori evaluasi kebijakan yang dikemukakan oleh William Dunn. (Dunn, 1994)

**BAB 6 : KESIMPULAN DAN SARAN**

Bab ini merupakan bagian akhir dari rangkaian penulisan penelitian yang berisi kesimpulan dari pembahasan analisis dari bab-bab sebelumnya, dan saran bagi sekolah untuk melakukan pengembangan sekolah yang lebih baik dalam menuju sekolah bertaraf internasional, serta saran bagi pemerintah, dalam hal ini Departemen Pendidikan Nasional, dalam kebijakan subsidi RSDBI.

